MODAL SOSIAL DALAM PENGELOLAAN SAMPAH: STUDI KASUS DI BANK SAMPAH GATI BUMI DESA GOGODESO KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR

Karina Zahra' Qadiriyyah
NPP. 33.0553
Program Studi Pembangunan Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat
Email: karinazahra26@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Samsul Arifin, S.Pd., MM.
Email: samsularifin11112@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background* (GAP)*: *Blitar Regency has a very low waste reduction rate of only 0.03%, with 99.97% of waste still being improperly managed. Gati Bumi Waste Bank emerges as a community-based solution, yet it still faces various operational and community participation challenges.* ***Purpose:*** *examine social capital in waste management at Gati Bumi Waste Bank.* ***Method:*** *This research employs a descriptive qualitative approach with a case study method. The analytical framework uses Robert D. Putnam's social capital theory, which encompasses three elements: networks, norms, and trust. Data collection techniques include in-depth interviews, participant observation, and documentation. Informants were selected using purposive sampling and snowball sampling techniques. Data analysis followed the Miles and Huberman model.* ***Result:*** *(1) social capital at Gati Bumi Waste Bank has been relatively well-established through strong social networks with various parties (Environmental Agency, State-Owned Enterprises, collectors), social norms through a reward system for active customers, and high trust between managers and customers; (2) there are two main inhibiting factors: structural/operational barriers (limited facilities and infrastructure, and limited digital access for the elderly) as well as relational/cultural barriers (communication gaps with the village government, absence of written rules, transactional participation, and dependence on key figures); (3) The efforts of the Blitar Regency Government include the Berseri Village program, waste bank communication forums, training and technical assistance, provision of facilities and infrastructure, routine monitoring and evaluation, and an integrated intervention plan in Gogodeso Village.* ***Conclusion:*** *Social capital at Gati Bumi Waste Bank has been relatively well-established, yet structural and relational barriers still need to be addressed. Synergy among managers, the regency government, and the village government is required for program sustainability.*

Keyword: *Social Capital, Waste Management, Waste Bank*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Kabupaten Blitar memiliki tingkat pengurangan sampah yang sangat rendah yaitu hanya 0,03%, dengan 99,97% sampah belum dikelola dengan baik. Bank Sampah Gati Bumi hadir sebagai solusi berbasis masyarakat, namun masih menghadapi berbagai hambatan operasional dan partisipasi masyarakat. **Tujuan:** Untuk mengetahui modal sosial dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Gati Bumi. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pisau analisis menggunakan teori modal sosial Robert D. Putnam yang mencakup tiga unsur: jaringan (*network*), norma (*norms*), dan kepercayaan (*trust*). Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. **Hasil/Temuan:** (1) modal sosial di Bank Sampah Gati Bumi telah terbangun cukup baik melalui jaringan sosial yang kuat dengan berbagai pihak (DLH, BUMN, pengepul), norma sosial melalui sistem *reward* bagi nasabah aktif, dan kepercayaan yang tinggi antara pengelola dan nasabah; (2) terdapat dua faktor penghambat utama: hambatan struktural/operasional (keterbatasan sarana prasarana dan akses digital bagi lansia) serta hambatan relasional/kultural (kesenjangan komunikasi dengan pemerintah desa, tidak adanya aturan tertulis, partisipasi transaksional, dan ketergantungan pada figur penggerak); (3) Upaya Pemerintah Kabupaten Blitar meliputi program Desa Berseri, forum komunikasi bank sampah, pelatihan dan pendampingan teknis, bantuan sarana prasarana, *monitoring* dan evaluasi rutin, serta rencana intervensi terpadu di Desa Gogodeso. **Kesimpulan:** Modal sosial di Bank Sampah Gati Bumi telah terbangun cukup baik namun masih terdapat hambatan struktural dan relasional yang perlu diatasi. Diperlukan sinergi antara pengelola, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa untuk keberlanjutan program.

Kata Kunci: Bank Sampah, Modal Sosial, Pengelolaan Sampah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara global, kota-kota menghadapi tantangan meningkatnya jumlah limbah padat seiring dengan pertumbuhan populasi dan peningkatan pendapatan masyarakat (Filimonova & Birchall, 2024). Menurut laporan World Bank tahun 2023, dunia menghasilkan lebih dari 2,1 miliar ton sampah setiap tahunnya, dengan 33% di antaranya tidak dikelola dengan aman bagi lingkungan (Kaza et al., 2018). Diperkirakan volume sampah global akan meningkat hingga 3,4 miliar ton pada tahun 2050 jika tidak ada intervensi signifikan. Dalam konteks global ini, Indonesia turut menghadapi tantangan berat, menempati posisi sebagai salah satu kontributor utama permasalahan sampah dunia. Dalam skala nasional, Indonesia menghasilkan 69,7 juta ton sampah per tahun, dengan 33% tidak dikelola dengan baik (METRO TV, 2025). Jumlah ini menjadikan Indonesia peringkat ke-5 penyumbang sampah dunia setelah Brazil (Monica, 2025). Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi penyumbang sampah terbanyak di Indonesia yakni sebesar 6.394.458,47 ton per tahun (SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, 2024). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

mengamanatkan pengelolaan sampah yang sistematis dan berkelanjutan. Namun implementasinya masih jauh dari harapan.

Tabel 1

Data Capaian Pengelolaan Sampah di Bakorwil III Malang

Kabupaten/Kota	Jumlah Timbunan	% Sampah Dikelola	% Sampah Belum Dikelola
Kabupaten Blitar	417	0,03	99,97
Kabupaten Pasuruan	834	0,31	99,69
Kabupaten Malang	1.094	0,49	99,51
Kota Batu	122	0,60	99,40
Kabupaten Sidoarjo	892	0,90	99,10
Kota Pasuruan	149	0,93	99,07
Kota Surabaya	1.811	0,98	99,02
Kota Blitar	77	0,98	99,02
Kota Malang	731	0,99	99,01

Sumber: SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, 2025 (https://sampahnasional.kemenlh.go.id/portal-indikatif/data/timbulan-sampah)

Berdasarkan data diatas, Kabupaten Blitar memiliki tingkat pengurangan sampah hanya 0,03%, artinya 99,97% sampah belum dikelola dengan baik. Angka ini merupakan terendah di antara 9 kabupaten/kota di wilayah Bakorwil III Malang. Komposisi sampah terbesar berasal dari rumah tangga (93,92 ton), sehingga diperlukan perhatian khusus masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Kompleksitas permasalahan pengelolaan sampah tidak hanya disebabkan oleh meningkatnya jumlah sampah dengan karakteristik yang semakin beragam, tetapi juga oleh menurunnya daya dukung lingkungan (Satori et al., 2020). Rendahnya angka pengurangan sampah di Kabupaten Blitar tidak terlepas dari berbagai faktor. Pertama, implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 18 Tahun 2022 tentang SERULING di tingkat desa belum optimal. Kedua, keterbatasan sarana prasarana TPA dan fasilitas pengolahan sampah. Ketiga, kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilahan sampah dari sumber masih sangat rendah.

Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2021 mendorong pembentukan bank sampah sebagai sarana pengumpulan dan pemanfaatan kembali sampah bernilai guna. Bank Sampah Gati Bumi di Desa Gogodeso didirikan tahun 2017 dan telah berbadan hukum sejak April 2020. Keunggulannya antara lain: menerapkan ekonomi sirkular, memiliki jaringan mitra (DLH dan PLN), aktif melakukan edukasi, serta memiliki 100 nasabah dari berbagai desa. Kegiatan edukasi ini sejalan dengan praktik di negara maju, dimana *Environmental Protection Agency* (EPA) Amerika Serikat juga menekankan pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat dan edukasi generasi muda untuk mendukung ekonomi sirkular melalui pengelolaan sampah yang lebih baik (Monegro et al., 2024). Namun, Bank Sampah Gati Bumi masih menghadapi hambatan serius. Hambatan operasional meliputi keterbatasan mobil bak sampah dan akses digital bagi nasabah lansia. Hambatan relasional berupa

kesenjangan komunikasi dengan pemerintah desa. Hambatan kultural meliputi rendahnya kesadaran memilah sampah dan partisipasi yang cenderung transaksional.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis operasional, tetapi juga pada aspek sosial kemasyarakatan. Pendekatan yang mampu menyentuh nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Knickmeyer (2020) menelaah secara rinci faktor-faktor sosial yang memengaruhi perilaku pemilahan sampah rumah tangga, meliputi karakteristik demografis, faktor psikologis, faktor ekonomi, dan latar belakang politik (Argentiero et al., 2023). Di sinilah konsep modal sosial menjadi sangat relevan untuk dikaji. Modal sosial pertama kali diperkenalkan oleh Hanifan yang menggambarkan bagaimana evolusi modal sosial di sebuah komunitas pedesaan (Hanifan, 1916), kemudian dikembangkan oleh Bourdieu yang menekankan pada hubungan dalam sebuah komunitas sehingga individu akan mendapatkan dukungan secara utuh dari individu lain dalam komunitas tersebut yang mengaitkannya dengan modal ekonomi dan budaya (Bourdieu, 1986), serta Coleman yang menekankan fungsinya dalam memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial (Coleman, 1990). Selanjutnya, Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai fitur organisasi sosial yang di dalamnya terdapat jaringan, norma, dan kepercayaan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan terkoordinasi (Putnam, 2001).

Modal sosial yang kuat dalam komunitas tidak hanya mendorong partisipasi aktif dan kerja sama kolektif, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh (Hamid, 2018; Suaib, 2023), pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya adalah upaya untuk memandirikan masyarakat serta mengembangkan potensi kemampuan yang mereka miliki, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati dirinya secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Dalam konteks Bank Sampah Gati Bumi, pemberdayaan diwujudkan melalui kemampuan nasabah mengubah sampah menjadi nilai ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Modal sosial penting diteliti karena mampu memecahkan masalah partisipasi masyarakat dengan cara yang lebih berkelanjutan dibandingkan sekadar memberikan insentif uang atau fasilitas fisik semata. Tanpa modal sosial, masyarakat tidak dapat bekerja sama secara efektif (Claridge, 2014). Jaringan sosial, norma, dan kepercayaan yang kuat dalam komunitas dapat mendorong masyarakat untuk aktif mengelola sampah tanpa terus bergantung pada bantuan pemerintah. Di tengah keterbatasan anggaran dan sarana prasarana, pendekatan berbasis modal sosial ini justru menjadi solusi yang paling efektif untuk memahami secara mendalam bagaimana sebenarnya modal sosial bekerja dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Penulis berfokus pada permasalahan rendahnya tingkat pengurangan sampah dan kurangnya optimalisasi modal sosial dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Blitar, sementara itu pengelolaan sampah menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan serta mendukung target *zero waste* sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Sejahtera Bersama Rumah Ramah Lingkungan (SERULING).

Terdapat beberapa permasalahan berkaitan dengan modal sosial dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Gati Bumi ini. Faktor jaringan sosial merupakan salah satunya. Jaringan formal Bank

Sampah Gati Bumi dengan pemerintah desa tidak terjalin dengan baik. Sejak perubahan nama dari Cakrayuda menjadi Gati Bumi pada tahun 2020, bank sampah ini melepas diri dari desa sehingga tidak pernah lagi melakukan komunikasi dan koordinasi resmi dengan Kepala Desa Gogodeso. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Desa Gogodeso bahwa "selama ini tidak ada laporan" dan "komunikasi selama ini tanpa kabar" (Wawancara, 7 Januari 2026). Data ini menunjukkan bahwa lemahnya jaringan kelembagaan antara bank sampah dengan pemerintah desa berpotensi menghambat sinergi program pengelolaan sampah di tingkat lokal. Padahal dalam mengembangkan suatu program pengelolaan sampah yang berkelanjutan, dibutuhkan peran aktif pemerintah desa guna mendukung kebijakan dan alokasi sumber daya desa bagi kegiatan berbasis masyarakat.

Kurangnya norma tertulis dan mekanisme sanksi sosial menjadi permasalahan berikutnya. Tidak adanya aturan tertulis yang disepakati secara formal antara pengelola dan nasabah menjadi kendala serius dalam membangun kepatuhan kolektif. Satu-satunya kesepakatan yang ada hanya mengenai waktu penarikan tabungan setahun sekali menjelang puasa, sementara aturan tentang kewajiban memilah sampah dari sumber, jadwal setor, dan konsekuensi bagi nasabah pasif tidak pernah disepakati. Pengelola sendiri mengakui bahwa "*punishment* itu tidak ada, cenderung ke *reward*" (Wawancara, 8 Januari 2026). Hal ini menunjukkan belum terbangunnya kepatuhan yang mengikat seluruh nasabah, sehingga partisipasi masyarakat menjadi fluktuatif dan rentan terhadap faktor eksternal seperti kesibukan pekerjaan atau naik turunnya harga sampah.

Budaya partisipasi yang transaksional dan ketergantungan pada figur penggerak turut memperparah kondisi tersebut. Sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat cenderung berpartisipasi dalam kegiatan bank sampah hanya ketika ada insentif ekonomi yang jelas, bukan didasari oleh kesadaran lingkungan atau kewajiban normatif. Ketika harga sampah sedang tinggi, partisipasi masyarakat meningkat; sebaliknya, ketika harga sampah anjlok, motivasi masyarakat untuk mengumpulkan dan menyetor sampah ikut menurun drastis. Selain itu, Bank Sampah Gati Bumi sangat bergantung pada satu figur penggerak (Ibu Mardiyani). Jika figur sentral ini berhalangan karena sakit, tugas, atau kepentingan lain, maka dikhawatirkan kegiatan bank sampah akan terganggu atau bahkan terhenti. Hal ini menunjukkan bahwa kelembagaan bank sampah belum kuat dan belum terbangun sistem manajemen yang berbagi peran secara merata.

Meskipun berbagai studi telah membahas modal sosial dalam pengelolaan sampah dan bank sampah, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji klasifikasi hambatan pengembangan modal sosial (struktural/operasional dan relasional/kultural) dalam pengelolaan sampah berbasis bank sampah di tingkat desa. Selain itu, masih terbatas penelitian yang menganalisis secara simultan tiga level aktor (masyarakat/pengelola bank sampah, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten) dalam memahami dinamika modal sosial dan kolaborasi antar level pemerintahan pada program bank sampah di Kabupaten Blitar, khususnya di Bank Sampah Gati Bumi Desa Gogodeso.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting mengingat untuk memberikan gambaran empiris mengenai modal sosial dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Gati Bumi Desa Gogodeso sebagai dasar perumusan strategi oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Desa Gogodeso selanjutnya dalam peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan keberlanjutan program bank sampah di tengah

berbagai tantangan seperti rendahnya tingkat pengurangan sampah (hanya 0,03%), lemahnya jaringan sosial dengan pemerintah desa, tidak adanya aturan tertulis dan mekanisme sanksi sosial, partisipasi masyarakat yang bersifat transaksional, ketergantungan pada figur penggerak, serta keterbatasan akses digital bagi nasabah lansia.

Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, maka Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Desa Gogodeso serta pengelola Bank Sampah Gati Bumi akan kekurangan dasar empiris yang kuat dalam memahami kondisi aktual modal sosial (jaringan, norma, dan kepercayaan) serta faktor-faktor penghambat pengembangannya secara faktual, sehingga perumusan strategi intervensi dan pengembangan program berisiko tidak tepat sasaran, kurang efektif, dan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Akibatnya, upaya penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui Bank Sampah Gati Bumi dapat berjalan kurang optimal, bahkan berpotensi stagnan atau mengalami kegagalan seperti yang dialami pendahulunya (Bank Sampah Cakrayuda) karena tidak didukung oleh data yang memadai untuk perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks modal sosial maupun dalam konteks pengelolaan sampah berbasis bank sampah. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian modal sosial dan pengelolaan sampah memiliki variasi fokus serta temuan yang beragam. Alfiansyah menunjukkan bahwa modal sosial Putnam menjadi instrumen penting bagi BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat, dengan norma tercermin melalui gotong royong, jaringan sosial melalui kerja sama dengan Persatuan BUMDes Indonesia, dan kepercayaan melalui pengelolaan program Bank Sampah (Alfiansyah, 2023). Subagyo & Legowo menemukan bahwa nilai keikhlasan dan norma tolong-menolong menjadi identitas kolektif yang memperkuat modal sosial mengikat (*bonding*), sementara kepercayaan berfungsi sebagai landasan kerja sama dengan pihak lain yang membentuk modal sosial menjembatani (*bridging*), serta jaringan berperan dalam memperluas kolaborasi lintas kelompok yang menciptakan modal sosial menghubungkan (*linking*) (Subagyo & Legowo, 2021). Mukromi menunjukkan bahwa ketiga aspek modal sosial (jaringan, norma, dan kepercayaan) memiliki hubungan positif dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berkelanjutan, yang berdampak pada terciptanya nilai tambah ekonomi, terbangunnya relasi antar kelompok, serta meningkatnya kebersihan lingkungan (Mukromi, 2023). Prawisudawati & Kustanti menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat lebih ditekankan pada modal sosial, namun masyarakat masih banyak yang belum memahami proses pengelolaan sampah secara baik dan benar sehingga mereka hanya melaksanakan pemilahan sampah pada saat diperintah saja, tidak menjadikannya sebagai budaya (Prawisudawati et al., 2024). Pitaloka, Idrus & Saifuddin menunjukkan bahwa terdapat empat unsur pokok modal sosial yang mendukung keberlangsungan pengelolaan bank sampah yaitu kerjasama, kepercayaan, jaringan, dan nilai/norma, serta modal sosial membantu masyarakat dalam meningkatkan nilai sosial dan nilai ekonomi dari sampah (Pitaloka et al., 2024). Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan dominasi metode kualitatif dengan beragam pendekatan teoritis serta variasi karakteristik objek penelitian yang berbeda-beda sesuai fokus kajian masing-masing.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks modal sosial maupun dalam konteks pengelolaan sampah berbasis bank sampah. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian modal sosial dan pengelolaan sampah memiliki variasi fokus serta temuan yang beragam. Alfiansyah menunjukkan bahwa modal sosial Putnam menjadi instrumen penting bagi BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat, dengan norma tercermin melalui gotong royong, jaringan sosial melalui kerja sama dengan Persatuan BUMDes Indonesia, dan kepercayaan melalui pengelolaan program Bank Sampah. Meskipun sama-sama menggunakan teori Putnam dan metode kualitatif studi kasus, objek penelitian Alfiansyah adalah pemberdayaan masyarakat desa secara umum melalui BUMDes, sementara penelitian ini secara spesifik berfokus pada pengelolaan sampah di bank sampah. Selain itu, Alfiansyah menganalisis BUMDes yang memiliki struktur formal dan dukungan desa, sedangkan penelitian ini menganalisis bank sampah yang beroperasi secara mandiri tanpa dukungan signifikan dari pemerintah desa (Alfiansyah, 2023).

Kedua, perbedaan dengan penelitian Subagyo & Legowo (2021) terletak pada teori yang digunakan. Subagyo & Legowo menggunakan teori Fukuyama yang menekankan pada kepercayaan sebagai landasan kerja sama, sementara penelitian ini menggunakan teori Putnam yang mencakup tiga unsur (jaringan, norma, dan kepercayaan). Selain itu, nilai yang dominan dalam penelitian mereka adalah nilai keikhlasan sebagai identitas kolektif masyarakat, sedangkan penelitian ini menemukan bahwa nilai transaksional (insentif ekonomi) justru lebih dominan dalam mendorong partisipasi masyarakat di Bank Sampah Gati Bumi. Penelitian ini menemukan bahwa nilai keikhlasan dan norma tolong-menolong menjadi identitas kolektif yang memperkuat modal sosial mengikat (bonding), sementara kepercayaan berfungsi sebagai landasan kerja sama dengan pihak lain yang membentuk modal sosial menjembatani (bridging), serta jaringan berperan dalam memperluas kolaborasi lintas kelompok yang menciptakan modal sosial menghubungkan (linking) (Subagyo & Legowo, 2021).

Mukromi menunjukkan bahwa ketiga aspek modal sosial (jaringan, norma, dan kepercayaan) memiliki hubungan positif dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berkelanjutan, yang berdampak pada terciptanya nilai tambah ekonomi, terbangunnya relasi antar kelompok, serta meningkatnya kebersihan lingkungan. Perbedaan dengan penelitian Mukromi sangat mendasar. Penelitian Mukromi hanya berfokus pada dampak positif modal sosial terhadap partisipasi masyarakat, tanpa mengklasifikasikan faktor-faktor yang menghambat pengembangan modal sosial, serta hanya menganalisis peran modal sosial di tingkat komunitas tanpa mengkaji upaya pemerintah. Sebaliknya, penelitian ini mengklasifikasikan hambatan pengembangan modal sosial menjadi dua kategori (struktural/operasional dan relasional/kultural), serta menganalisis secara simultan tiga level aktor (masyarakat/pengelola, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten) (Mukromi, 2023).

Prawisudawati & Kustanti menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat lebih ditekankan pada modal sosial, namun masyarakat masih banyak yang belum memahami proses pengelolaan sampah secara baik dan benar sehingga mereka hanya melaksanakan pemilahan sampah pada saat diperintah saja, tidak menjadikannya sebagai budaya. Perbedaan dengan penelitian Prawisudawati & Kustanti terletak pada fokus permasalahan. Penelitian mereka menekankan pada minimnya pemahaman masyarakat sebagai penyebab rendahnya partisipasi,

sementara penelitian ini menemukan bahwa hambatan tidak hanya bersifat kognitif tetapi juga struktural (keterbatasan sarana dan akses digital) dan relasional (kesenjangan komunikasi dengan pemerintah desa) (Prawisudawati et al., 2024).

Pitaloka, Idrus & Saifuddin menunjukkan bahwa terdapat empat unsur pokok modal sosial yang mendukung keberlangsungan pengelolaan bank sampah yaitu kerjasama, kepercayaan, jaringan, dan nilai/norma, serta modal sosial membantu masyarakat dalam meningkatkan nilai sosial dan nilai ekonomi dari sampah. Perbedaan dengan penelitian Pitaloka, Idrus & Saifuddin terletak pada jumlah unsur teori dan lokus penelitian. Mereka menggunakan empat unsur pokok modal sosial (kerjasama, kepercayaan, jaringan, dan nilai/norma) di wilayah perkotaan (Kota Makassar), sementara penelitian ini menggunakan tiga unsur Putnam (jaringan, norma, dan kepercayaan) di wilayah pedesaan (Desa Gogodeso) dengan karakteristik kearifan lokal yang berbeda. (Pitaloka et al., 2024). Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan dominasi metode kualitatif dengan beragam pendekatan teoritis serta variasi karakteristik objek penelitian yang berbeda-beda sesuai fokus kajian masing-masing. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah yang belum dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu, yaitu klasifikasi hambatan pengembangan modal sosial, analisis multi-aktor secara simultan, serta lokus penelitian di bank sampah pedesaan yang menerapkan ekonomi sirkular.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modal sosial dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Gati Bumi Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

II. METODE

Metodelogi penelitian yang mana metodelogi penelitian ialah sekumpulan metode penelitian yang dapat digunakan oleh mahasiswa, peneliti, dan penggiat ilmu pemerintahan dalam menyelesaikan tugas akhir yang ditugaskan seperti skripsi (Simangunsong, 2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif yang didefinisikan sebagai metode yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks alaminya (*natural setting*) (Sugiarto dalam Wulandari et al., 2024). Penelitian ini menerapkan paradigma konstruktivisme yang berasumsi bahwa peneliti memiliki tujuan utama, yakni berusaha memahami (atau menafsirkan) makna yang dimiliki orang lain tentang dunia (Creswell, 2019). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan penelitian yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana pengelola bank sampah, pemerintah daerah, dan masyarakat nasabah secara bersama-sama mengkonstruksi makna, nilai, dan praktik terkait modal sosial dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Gati Bumi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena secara faktual, tetapi juga berupaya memahami proses sosial di baliknya bagaimana kepercayaan, jaringan, dan norma dibentuk, dipelihara, dan dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan sampah yang partisipatif dan berkelanjutan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 9 informan yang dipilih secara *purposive sampling* dilanjutkan dengan *snowball sampling* berdasarkan tingkat usia, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam kegiatan pengelolaan Bank Sampah Gati Bumi.

Pemilihan informan ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti, sehingga data yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2019). Informan tersebut terdiri dari Pengelola Bank Sampah Gati Bumi sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan kebijakan dan pengambil keputusan utama dalam program, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, Kepala Bidang Persampahan dan Pertamanan DLH Kabupaten Blitar, serta lima nasabah Bank Sampah Gati Bumi sebagai pelaksana langsung program. Kombinasi informan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang utuh dari sisi kebijakan, pelaksana, dan penerima manfaat. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan, data Badan Pusat Statistik, buku, laporan penelitian, maupun artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan utama. Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada isu-isu kritis, serta mencari tema dan pola yang mendasari data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2019). Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk menggambarkan hasil temuan mengenai partisipasi masyarakat dan modal sosial dalam pengelolaan sampah, serta dilengkapi dengan bentuk penyajian data lainnya seperti tabel dan gambar jika diperlukan. Penarikan kesimpulan/verifikasi dilakukan sebagai hasil akhir dari proses analisis data yang menjawab fokus penelitian berdasarkan temuan lapangan, dengan melakukan verifikasi terhadap data dan hasil analisis untuk memastikan kebenaran serta konsistensinya dengan tujuan penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, yang menjadi lokasi Bank Sampah Gati Bumi, serta di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar sebagai instansi pemerintah daerah yang membina bank sampah. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih dua bulan, yaitu pada bulan Desember 2025 hingga Januari 2026, yang mencakup proses observasi awal, perizinan penelitian, pelaksanaan wawancara mendalam dengan 9 informan, observasi partisipatif di lokasi kegiatan bank sampah, serta pengumpulan dokumentasi kegiatan program. Dengan rentang waktu tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan kondisi modal sosial dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Gati Bumi secara aktual dan kontekstual sesuai dengan dinamika program yang sedang berjalan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara luas, modal sosial mencakup akses terhadap informasi, keberadaan kepercayaan, dan norma-norma yang membentuk interaksi dalam jaringan sosial (Alipour et al., 2025). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, modal sosial dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Gati Bumi dianalisis menggunakan teori modal sosial Robert D. Putnam yang mencakup tiga unsur utama, yaitu jaringan (*network*), norma (*norms*), dan kepercayaan (*trust*).

3.1 Jaringan Sosial (*Network*)

Jaringan sosial merupakan salah satu unsur modal sosial yang berperan penting dalam membangun dan mempertahankan hubungan antarindividu maupun kelompok dalam masyarakat. Jaringan ini terbentuk melalui interaksi sosial, baik dalam bentuk komunikasi langsung, kerja sama dalam kegiatan lingkungan, maupun partisipasi dalam acara sosial. Dalam konteks Bank Sampah Gati Bumi, jaringan sosial tidak hanya berfungsi sebagai saluran komunikasi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mengakses sumber daya, informasi, dan dukungan dari berbagai pihak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, jaringan sosial di Bank Sampah Gati Bumi tercermin dalam dua indikator, yaitu keberadaan jaringan formal dan informal serta intensitas interaksi.

3.1.1 Keberadaan Jaringan Formal dan Informal

Jaringan sosial dalam masyarakat dapat terbentuk sebagai jaringan formal atau jaringan informal (Sudarmono, 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Sampah Gati Bumi telah membangun jaringan formal dengan berbagai pihak. Ibu Mardiyani selaku Pengelola Bank Sampah Gati Bumi mengungkapkan: "Kemitraan kita pasti punya, yaitu pengepul besar. Kita punya dua pengepul yang kita pegang. Gati Bumi juga dikasih kepercayaan sama DLH untuk menjemput sampah 22 OPD. Selain itu, kita juga kerja sama dengan PLN MP Nusantara Power. Gati Bumi sudah Kemenkumham, jadi kita berkegiatan itu sesuai yang ada di legalitasnya" (Wawancara, 8 Januari 2026). Peneliti menyimpulkan bahwa Bank Sampah Gati Bumi memiliki jaringan formal dengan pengepul, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, serta PT. PLN Nusantara Power. Selain itu, legalitas Kemenkumham menjadi fondasi formal yang memungkinkan bank sampah ini diakui secara nasional dan dapat menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.

Gambar 1

Dokumentasi Kunjungan dari tim CSR dan tim Lingkungan Kantor Pusat PT. PLN Nusantara Power ke Bank Sampah Gati Bumi



Sumber: Arsip Bank Sampah Gati Bumi, 2021

Selain jaringan formal, Bank Sampah Gati Bumi juga memiliki jaringan informal yang berperan sebagai pengikat sosial dan saluran komunikasi primer dengan masyarakat. Ibu Mardiyani menjelaskan strategi komunikasi informal yang dilakukan: "Selain WA, kita juga melakukan *anjang sana* (silaturahmi langsung). Kita *nebeng* ke acara-acara RT untuk sosialisasi kalau ada program baru atau mengajak nasabah baru. Kalau grupnya itu kalau nasabah pasti ada yang aktif, ada yang tidak, ya paling cuma tanya kapan penjemputan, gitu. Ada perubahan harga atau mungkin komunikasi terkait, salah perhitungan di tabungan" (Wawancara, 8 Januari 2026).

Observasi peneliti di lokasi kegiatan menunjukkan bahwa pengelola terlihat akrab dan mudah bergaul dengan nasabah yang datang. Grup *WhatsApp* Gati Bumi terpantau aktif digunakan untuk menyampaikan informasi jadwal penjemputan, perubahan harga, dan pengumuman lainnya. Dokumentasi proses penjemputan sampah nasabah memperlihatkan bagaimana para nasabah saling membantu mengangkut sampah, terutama bagi yang tidak memiliki kendaraan. Suasana yang terlihat dalam dokumentasi tersebut hangat dan akrab, menunjukkan bahwa hubungan antara pengelola dan nasabah tidak bersifat transaksional semata, tetapi juga personal.

Gambar 2

Dokumentasi Proses Penjemputan Sampah Nasabah



Sumber: Observasi Peneliti, 2025

Dari sisi nasabah, jaringan informal terbentuk melalui ikatan ketetanggaan. Bapak Adi (Informan 5) menyampaikan: "Mulai menabung tahun 2021 setelah diajak oleh Bu RT dan kenal Mbak Mardiyani karena tetangga sendiri. Sesekali ketika bertemu di posyandu atau arisan, mereka membicarakan bank sampah" (Wawancara, 18 Januari 2026). Lebih lanjut, Ibu Tumirah (Informan 8) menambahkan: "Para nasabah umumnya adalah langganan warung saya, sehingga saya bertemu mereka setiap hari dan sering ngobrol soal bank sampah sambil ngopi" (Wawancara, 19 Januari 2026). Pernyataan ini menunjukkan bahwa jaringan informal berbasis kepemimpinan lokal (Bu RT) dan ruang-ruang sosial yang sudah ada (posyandu, arisan) menjadi medium rekrutmen dan komunikasi yang paling efektif. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ibu Yuni (Informan 7): "Saya pindahan dari Malang, terus dikenalin sama tetangga. Di Malang saya juga sudah terbiasa pilah sampah. Saya kaget pas pindah sini, ternyata ada bank sampah. Saya senang, jadi nggak putus kebiasaan baik. Saya kadang bantu sosialisasi di sekolah tempat saya ngajar, ngajak murid-murid kumpulin botol bekas. Mbak Mardiyani sering hadir di acara PKK atau karang taruna, jadi kita bisa ketemu di situ" (Wawancara, 19 Januari 2026).

Namun, terdapat kelemahan signifikan pada jaringan dengan pemerintah desa. Bapak Suwondo selaku Kepala Desa Gogodeso menyatakan dengan terus terang: "Cakrayuda sudah maju dengan masalah bank sampah yang akhirnya ganti Gati Bumi dan saat itu terlepas dari desa sehingga tidak pernah menghadap kepala desa sama sekali. Selama ini gak ada laporan, komunikasi selama ini juga tanpa kabar" (Wawancara, 7 Januari 2026). Observasi di kantor desa mengonfirmasi pernyataan

ini: tidak ditemukan dokumen, arsip, papan informasi, atau catatan apapun tentang Bank Sampah Gati Bumi. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan dengan pemerintah desa belum terbangun dengan baik, bahkan cenderung terputus sama sekali.

Ibu Mardiyani juga mengakui hal ini: "Kalau pemerintah desa itu kita sebenarnya jarang komunikasi. Komunikasinya paling, soalnya kita pernah mau komunikasi, kita intinya bagian dari mereka. Cuma karena disitu ya, ngapain, ada dana CSR disitu. Maunya pemerintah itu kan dananya itu ke desa, sedangkan pemberi CSR ini maunya ke pelaku-pelaku langsung atau UMKM. Jadi ada gesekan di situ, makanya kurang ada komunikasi di pemerintah desa. Tapi memang kalau mungkin perangkatnya atau mungkin sekretaris desanya itu justru mendukung. Jadi beliau-nya malah mendukung, tidak mau menghambat, tidak menghalangi, yang penting menguntungkan desa gitu" (Wawancara, 8 Januari 2026). Pernyataan ini menunjukkan adanya dualisme sikap dalam pemerintah desa: secara kelembagaan formal terjadi kesenjangan komunikasi, tetapi secara personal beberapa perangkat desa justru memberikan dukungan penuh tanpa menghambat kegiatan Gati Bumi.

3.1.2 Intensitas Interaksi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi pertemuan rutin di Bank Sampah Gati Bumi bervariasi. Ibu Mardiyani menjelaskan: "Pertemuan rutin tiap tiga bulan dilakukan untuk asosiasi bank sampah, bukan untuk nasabah, karena komunikasi dengan nasabah hanya lewat WA. Internal pengurus inti mengadakan pertemuan setiap enam bulan sekali untuk membahas laporan keuangan" (Wawancara, 8 Januari 2026). Observasi peneliti dalam grup *WhatsApp* Bank Sampah Gati Bumi menunjukkan bahwa frekuensi komunikasi dalam grup cukup tinggi pada saat ada pengumuman seperti perubahan harga atau jadwal penjemputan, tetapi partisipasi aktif anggota tergolong rendah.

Ibu Yuni mengakui hal ini: "Grup WA efektif karena informasi cepat sampai, namun kadang yang baca cuma orang itu aja, sementara yang lain tidak. Tapi ya nggak apa-apa, lebih baik daripada nggak ada. Kalau ada hal urgent, saya datang langsung ke rumah Mbak Mardiyani" (Wawancara, 19 Januari 2026). Bapak Adi mengungkapkan: "Jarang ikut pertemuan rutin, komunikasi biasanya hanya saat penjemputan sambil ngobrol dengan Mbak Mardiyani. Kumpul besar setahun sekali pas mau Lebaran (pembagian tabungan)" (Wawancara, 18 Januari 2026). Observasi dalam grup *WhatsApp* menunjukkan bahwa frekuensi komunikasi cukup tinggi pada saat ada pengumuman, tetapi partisipasi aktif anggota tergolong rendah.

Bapak Karjo (Informan 6) yang berprofesi sebagai petani memiliki pola interaksi yang berbeda: "Saya usahakan setor tiap bulan. Tapi kadang lupa kalau lagi musim tanam sibuk. Saya punya HP Android, Mbak. Tapi nggak terlalu jago. Anak saya yang bantu lihat grup. Kalau ada info, anak saya yang bilang ke saya. Ya dari tetangga, Mbak. Kadang Bu RT teriak-teriak kalau ada jadwal. Atau pas ketemu di warung, pada ngobrol. Warga sini kan guyub, jadi informasi nyambung" (Wawancara, 18 Januari 2026). Pernyataan ini menunjukkan bahwa bagi nasabah dengan mobilitas tinggi (petani yang sibuk di musim tanam) dan keterbatasan literasi digital, frekuensi interaksi dengan bank sampah cenderung rendah dan sangat bergantung pada perantara informasi seperti anak atau tetangga.

Ibu Tumirah yang memiliki warung justru memiliki frekuensi interaksi yang lebih tinggi: "Saya tiap bulan pasti setor, Mbak. Terkadang dua minggu sekali kalau sampahnya menumpuk. Saya punya gerobak kecil sendiri, jadi bisa angkut banyak. Kalau kumpul-kumpul rutin mah nggak ada,

Mbak. Tapi saya sering ngobrol soal bank sampah sambil ngopi dengan nasabah lain. Kadang ada nasabah yang numpuk sampah di warung saya, nanti saya samperin pas dia datang. Saya bilang, 'Bu, sampahmu udah banyak lho, jangan lupa disetor'." (Wawancara, 19 Januari 2026). Observasi di warung Ibu Tumirah mengonfirmasi bahwa warung menjadi pusat pertemuan harian dan media komunikasi informal yang efektif.

Bapak Sugeng (Informan 9) menjelaskan pola interaksi yang diwakilkan: "Saya agak jarang setor, Mbak. Soalnya kerja kadang pulang malam. Tapi istri saya yang rajin. Setiap bulan pasti setor. Saya ikut grup WA, Mbak, tapi saya jarang baca. Istri saya yang lebih aktif. Saya cuma tahu kalau ada info penting. Kalau ada masalah teknis, istri yang urus. Saya hanya bantu angkut sampah pakai mobil kalau lagi libur" (Wawancara, 19 Januari 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa dalam budaya kolektif masyarakat Jawa, intensitas interaksi tidak harus melekat pada setiap individu secara personal; pelimpahan peran komunikasi kepada satu anggota keluarga (istri) adalah hal yang wajar dan tetap membuat seluruh anggota keluarga terinformasi secara tidak langsung.

Bagi nasabah lansia, intensitas interaksi justru lebih tinggi melalui saluran tradisional. Bapak Karjo (Informan 6) menuturkan: "Memiliki HP Android tetapi tidak terlalu jago, sehingga anak yang membantu melihat grup WA. Terkadang informasi juga didapat dari tetangga, Bu RT, atau obrolan di warung. Warga setempat guyub sehingga informasi nyambung" (Wawancara, 18 Januari 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa intensitas interaksi tidak selalu harus difasilitasi secara formal; ruang-ruang sosial yang sudah ada di masyarakat dapat menjadi medium yang efektif untuk mempertahankan komunikasi.

3.2 Norma

Norma merupakan aturan tidak tertulis dan nilai bersama yang membentuk perilaku masyarakat. Berdasarkan penelitian, norma yang hidup dalam pengelolaan Bank Sampah Gati Bumi tercermin dalam tiga indikator, yaitu norma timbal balik, norma kepatuhan, dan sanksi sosial.

3.2.1 Norma Timbal Balik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma timbal balik diwujudkan melalui sistem *reward*. Ibu Mardiyani menjelaskan: "Kalau *punishment* itu tidak ada, tapi cenderung ke *reward* supaya lebih memotivasi masyarakat setiap penarikan menjelang puasa, berupa sembako atau souvenir, untuk nasabah teraktif dan tabungan terbanyak" (Wawancara, 8 Januari 2026).

Gambar 3

Dokumentasi Pembagian Hasil Tabungan Sampah



Sumber: Arsip Bank Sampah Gati Bumi, 2025

Dalam dokumentasi tersebut terlihat bahwa momen pembagian tabungan menjelang puasa menjadi ajang yang dinanti-nantikan oleh nasabah, tidak hanya untuk mengambil uang tabungan tetapi juga untuk mendapatkan pengakuan sosial sebagai nasabah teraktif. Selain itu, ekspektasi saling membantu antar nasabah terbentuk secara alami meskipun belum terstruktur secara formal. Bapak Adi menyatakan: "Kalau saling bantu ya... kalau bantu langsung bantu ngangkut sampah gitu sih belum ada. Tapi kalau saling ngasih tahu info, iya. Misalnya saya punya sampah botol banyak, saya kabari Bu RT biar barengan setornya. Kalau ada sampah banyak, kadang saya titip tetangga yang motornya" (Wawancara, 18 Januari 2026). Bapak Karjo menambahkan: "Kadang kalau ada tetangga yang nggak punya kendaraan, saya bantu anterin sampahnya ke tempat kumpul. Warga sini kan guyub, jadi informasi nyambung. Kalau tolong-menolong ya pasti, Mbak. Wong jawa" (Wawancara, 18 Januari 2026). Observasi di lapangan mengonfirmasi bahwa praktik saling membantu ini terjadi secara alami, terutama dalam bentuk berbagi informasi dan bantuan transportasi bagi tetangga yang tidak memiliki kendaraan.

Ibu Yuni juga mengungkapkan bentuk dukungan yang lebih konkret: "Saya kadang bantu sosialisasi di sekolah tempat saya ngajar, ngajak murid-murid kumpulin botol bekas. Apabila ada acara di sekolah, saya meminta tolong nasabah lain nyumbang botol untuk prakarya, mereka pada bantu. Saling *support* gitu" (Wawancara, 19 Januari 2026). Ibu Tumirah memberikan gambaran unik tentang bagaimana warungnya menjadi simpul norma timbal balik: "Saya kenal, Mbak. Pada langganan warung saya semua. Jadi tiap hari ketemu. Sering ngobrol soal bank sampah sambil ngopi. Kadang ada nasabah yang numpuk sampah di warung saya, nanti saya samperin pas dia datang. Saya bilang, 'Bu, sampahmu udah banyak lho, jangan lupa disetor'. Sesama nasabah saling ngasih tahu" (Wawancara, 19 Januari 2026). Observasi di warung Ibu Tumirah mengonfirmasi bahwa warung tidak hanya berfungsi sebagai tempat usaha, tetapi juga sebagai ruang pertemuan sosial dan pusat informasi alami bagi nasabah. Interaksi sehari-hari di warung menjadi media untuk saling mengingatkan dan memotivasi, yang dalam kerangka modal sosial Putnam merupakan bentuk norma timbal balik yang diperkuat melalui interaksi berulang dan kehadiran fisik yang konsisten.

3.2.2 Norma Kepatuhan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma kepatuhan di Bank Sampah Gati Bumi dijalankan tanpa adanya aturan tertulis. Ibu Mardiyani mengungkapkan: "Belum ada kesepakatan tertulis, kesepakatan hanya pengambilan tabungan menjelang puasa dari hasil nabungnya nasabah. Sementara belum ada. Sama kalau membantu, gethuk tular, kayak sharing. Misalnya kayak, 'aku tadi nabung di Bank Sampah,' jadi kayak kita bantu gitu loh, kayak promosi. Iya, jadi mereka ikut kayak gitu. Kadang-kadang nanti di WA, 'Mbak, tetangga saya atau saudara saya itu mau jadi nasabah gitu'" (Wawancara, 8 Januari 2026). Observasi di lokasi kegiatan mengonfirmasi tidak adanya papan pengumuman yang memuat aturan tertulis.

Kepatuhan nasabah terhadap jadwal setor bervariasi. Bapak Adi menyatakan: "Setiap ada jadwal penjemputan, saya selalu nyetor sebulan sekali, pas minggu pertama. Saya rutin setor setiap jadwal. Di Malang saya juga sudah terbiasa pilah sampah, jadi kebiasaan baiknya tidak putus" (Wawancara, 18 Januari 2026). Ibu Yuni juga mengungkapkan: "Saya rajin setor setiap jadwal. Di Malang saya juga sudah terbiasa pilah sampah, jadi kebiasaan baiknya tidak putus. Saya sering tanya

kalau ada info nggak jelas, atau kadang saya share info dari sekolah ke grup" (Wawancara, 19 Januari 2026).

Namun, tidak semua nasabah memiliki tingkat kepatuhan yang sama. Bapak Karjo mengakui: "Tiap ada setoran, saya usahakan setor tiap bulan. Tapi terkadang lupa apabila sedang musim tanam sibuk. Saya berusaha setor tiap bulan. Tapi kadang lupa kalau lagi musim tanam sibuk. Paling dalam sebulan ya setor itu, pas jadwal" (Wawancara, 18 Januari 2026). Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan belum sepenuhnya terinternalisasi dan masih rentan terhadap faktor eksternal seperti kesibukan pekerjaan. Tidak ada rasa bersalah atau tekanan sosial yang signifikan ketika melewatkan jadwal setor.

Ibu Tumirah justru menunjukkan kepatuhan yang lebih tinggi, bahkan melebihi frekuensi standar: "Saya tiap bulan pasti setor, Mbak. Terkadang dua minggu sekali kalau sampahnya menumpuk. Saya punya gerobak kecil sendiri, jadi bisa angkut banyak. Warung jadi bersih, sampah tidak menumpuk, waktu lebaran dapat duit tambahan dari tabungan. Tahun kemarin saya dapat 300 ribu, lumayan buat beli baju lebaran" (Wawancara, 19 Januari 2026). Tingkat kepatuhan yang tinggi ini didorong oleh insentif ekonomi (warungnya menghasilkan banyak sampah) dan kemudahan akses (memiliki gerobak sendiri).

Bapak Sugeng (Informan 9) menjelaskan pola kepatuhan yang diwakilkan: "Saya agak jarang setor, Mbak. Soalnya kerja kadang pulang malam. Tapi istri saya yang rajin. Setiap bulan pasti setor. Saya cuma bantu angkut sampah pakai mobil kalau lagi libur. Saya ikut grup WA, Mbak, tapi saya jarang baca. Istri saya yang lebih aktif. Saya cuma tahu kalau ada info penting. Kalau ada masalah teknis, istri yang urus. Saya hanya bantu angkut sampah pakai mobil kalau lagi libur" (Wawancara, 19 Januari 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa dalam budaya kolektif masyarakat Jawa, kepatuhan dapat dimaknai sebagai tanggung jawab rumah tangga, bukan sekadar tanggung jawab individual. Secara individual Bapak Sugeng jarang menyetor, tetapi secara kolektif rumah tangga kepatuhan tetap terjaga karena istrinya yang rajin menyetor setiap bulan.

3.2.3 Sanksi Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi sosial belum berkembang secara signifikan sebagai instrumen pengendalian perilaku. Ibu Mardiyani menegaskan: "*Punishment* itu tidak ada, tetapi cenderung ke *reward* supaya lebih memotivasi masyarakat" (Wawancara, 8 Januari 2026). Dari sisi pemerintah daerah, Bapak Dr. Diana Ainu Rofiq, S.T., MM., Kepala Bidang PSP DLH Kabupaten Blitar mengonfirmasi: "Belum, belum ada sanksinya, cuman ketika masuk berseri mendapat fasilitas/apresiasi, misalnya roda tiga, bangunan bank sampah, fasilitas bak sampah terpilah" (Wawancara, 8 Januari 2026).

Meskipun tidak ada mekanisme sanksi formal, kontrol sosial alami tetap berlangsung dalam komunitas. Ibu Tumirah memberikan contoh konkret: "Kadang ada nasabah yang numpuk sampah di warung saya, nanti saya samperin pas dia datang. Saya bilang, 'Bu, sampahmu udah banyak lho, jangan lupa disetor'. Saya tegur lembut, Mbak, nada mengingatkan. Bukan marah-marah" (Wawancara, 19 Januari 2026). Observasi di warung Ibu Tumirah mengonfirmasi bahwa teguran ini disampaikan dengan nada bersahabat, bukan sebagai hukuman. Ini adalah bentuk kontrol sosial informal yang umum dalam masyarakat Jawa, di mana teguran disampaikan secara halus dan tidak konfrontatif.

Ibu Yuni juga menunjukkan sikap toleran terhadap nasabah yang kurang aktif di grup WA: "Tapi ya tidak masalah, lebih baik daripada tidak ada. Saya tidak pernah menghakimi nasabah yang jarang baca WA. Yang penting mereka tetap setor" (Wawancara, 19 Januari 2026). Observasi di grup WA mengonfirmasi bahwa tidak ada tekanan atau stigmatisasi terhadap nasabah yang pasif. Pendekatan positif lebih dominan dibandingkan sanksi sosial, dan masyarakat lebih menghargai keberadaan sarana komunikasi itu sendiri daripada mempersoalkan siapa yang aktif atau tidak. Ibu Mardiyani juga menambahkan bahwa pendekatan *reward* dipilih karena lebih efektif dalam konteks pengelolaan sampah berbasis masyarakat: "Intinya, *reward* lebih efektif daripada *punishment*. Program Tabungan Sampah untuk biaya sekolah atau sembako itu contoh nyata membangun norma baru" (Wawancara, 8 Januari 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks pengelolaan sampah berbasis masyarakat di pedesaan, pendekatan positif (insentif dan apresiasi) lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai harmoni dan menghindari konfrontasi langsung.

3.3 Kepercayaan

Kepercayaan merupakan elemen fundamental yang memungkinkan terjadinya koordinasi dan kerja sama. Kepercayaan dapat dipandang sebagai syarat keharusan dari terbentuk dan terbangunnya modal sosial yang kuat (atau lemah) dari suatu masyarakat (Nain et al., 2023). Berdasarkan hasil penelitian, kepercayaan di Bank Sampah Gati Bumi terbangun dalam tiga indikator, yaitu kepercayaan kelembagaan, kepercayaan interpersonal, dan transparansi.

3.3.1 Kepercayaan Kelembagaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah memiliki keyakinan terhadap keberlanjutan bank sampah. Bapak Adi menyatakan: "Beliau mulai nabung tahun 2021 dipikir lumayan buat tambah-tambah, sampah yang biasanya dibuang sekarang jadi ada harganya" (Wawancara, 18 Januari 2026). Ibu Tumirah menambahkan: "Sejak tahun 2020 sudah bergabung, lumayan buat lebaran. Warung jadi bersih, sampah tidak menumpuk, waktu lebaran dapat uang tambahan dari tabungan untuk beli baju lebaran" (Wawancara, 19 Januari 2026).

Ibu Mardiyani menceritakan testimoni nasabah: "Ada dua nasabah yang akhirnya bisa membayar semesteran anaknya dan beli alat-alat tukang dari tabungan sampah" (Wawancara, 8 Januari 2026). Kepercayaan kelembagaan juga terlihat dari keyakinan bahwa Gati Bumi memiliki legalitas formal. Ibu Mardiyani menjelaskan: "Gati Bumi sudah Kemenkumham, jadi kita berkegiatan itu sesuai yang ada di legalitasnya" (Wawancara, 8 Januari 2026).

Gambar 4
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Gati Bumi



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012637.AH.01.07.TAHUN 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN GATI BUMI BLITAR

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YUDHANA EKO PRASETYO S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 3 Tanggal 13 November 2020 yang dibuat oleh YUDHANA EKO PRASETYO S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan GATI BUMI BLITAR tanggal 02 Desember 2020 dengan Nomor Pendaftaran 6020120235100200 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan GATI BUMI BLITAR.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN GATI BUMI BLITAR
Berkedudukan di KABUPATEN BLITAR, sesuai salinan Akta Nomor 3 Tanggal 13 November 2020 yang dibuat oleh YUDHANA EKO PRASETYO S.H., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN BLITAR.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Januari 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Januari 2021

Sumber: Arsip Bank Sampah Gati Bumi, 2020

3.3.2 Kepercayaan Interpersonal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan interpersonal antara pengelola dan nasabah terbangun dengan baik melalui pendekatan personal yang konsisten. Bapak Adi menyatakan: "Mbak Mardiyani (pengelola) itu sering mampir ke warung, untuk beli minum, sambil tanya kabar, sehingga menjadi akrab. Saya percaya karena beliau orangnya jujur. Kalau ada masalah tabungan, beliau cepat respons lewat japri (chat pribadi)" (Wawancara, 18 Januari 2026). Bapak Karjo menambahkan: "Mbak Mardiyani itu orangnya sabar, mau jelasin ke orang tua kayak saya. Kalau saya bingung soal harga atau timbangan, saya tanya langsung. Beliau jelaskan dengan sabar, nggak pernah marah meskipun saya sering lupa-lupa" (Wawancara, 18 Januari 2026).

Ibu Yuni mengungkapkan: "Mbak Mardiyani orangnya *welcome*, ramah, dan responsif. Saya tidak ragu untuk bertanya atau menyampaikan keluhan. Saya sering japri beliau kalau ada yang kurang jelas, selalu direspons cepat" (Wawancara, 19 Januari 2026). Ibu Tumirah juga menuturkan: "Mbak Mardiyani itu sering mampir ke warung, beli minum, sambil tanya kabar. Jadi akrab. Saya tidak pernah ragu timbangan dan perhitungan sudah jujur dan benar. Saya percaya karena beliau orangnya jujur dan transparan" (Wawancara, 19 Januari 2026). Observasi pada kegiatan penjemputan menunjukkan interaksi hangat antara pengelola dan nasabah, di mana pengelola menyapa dengan ramah dan melayani dengan sabar.

Sistem pencatatan ganda yang diterapkan pengelola juga menjadi dasar kepercayaan interpersonal. Ibu Mardiyani menjelaskan secara teknis: "Ketika petugas mengambil sampah di nasabah, nasabah tersebut mendapatkan satu buku dan satu nota. Di dalam buku hanya tertulis saldo tabungannya. Sementara di dalam nota terdapat rincian yang lebih lengkap, misalnya berat sampah botol dalam kilogram dan nilai uang yang diperoleh. Jadi ada kalkulasi untuk setiap jenis sampah" (Wawancara, 8 Januari 2026).

Gambar 5
Pencatatan nota dan tabungan sampah nasabah.



Sumber: Arsip Bank Sampah Gati Bumi, 2025

Observasi pada proses penimbangan sampah menunjukkan bahwa pengelola melakukan penimbangan secara transparan di hadapan nasabah. Timbangan diletakkan di tempat yang dapat dilihat semua orang, dan hasil timbangan langsung diumumkan. Setiap nasabah langsung diberikan buku tabungan dan nota yang berisi rincian jenis sampah, berat, dan harga per kilogram. Bapak Karjo mengonfirmasi: "Saya percaya karena ada bukunya, ada catatannya. Jadi saya bisa lihat sendiri saldo saya berapa" (Wawancara, 18 Januari 2026).

3.3.3 Transparansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi di Bank Sampah Gati Bumi dipraktikkan namun masih terbatas. Ibu Mardiyani menjelaskan: "Kalau laporan keuangannya itu kan kita lebih ke internal ya, Mbak. Ya, jadi setiap 6 bulan sekali kita selalu bikin, kayak ngumpul sama pengurus inti jadi untuk laporan keuangan. Nah, untuk nasabah sendiri, kita biasanya kan karena disitu banyak-banyak RT, bukan satu dusun aja, jadi lebih ke WA. Jadi informasi penarikan tgl sekian, terus nanti disitu ada semacam, dulu tadi yang teraktif siapa, jadi cuma itu aja" (Wawancara, 8 Januari 2026).

Observasi di lokasi kegiatan mengonfirmasi bahwa tidak ada papan pengumuman yang memuat laporan keuangan. Bapak Adi mengakui: "Di grup WA dikasih info jadwal, perubahan harga, pengumuman lainnya. Tapi saya tidak tahu detail laporan keuangan secara keseluruhan karena informasi tersebut hanya dibagikan kepada pengurus inti. Tapi bagi saya sih nggak masalah, yang penting tabungan saya dicatat dengan benar" (Wawancara, 18 Januari 2026). Meskipun demikian, Ibu Yuni menilai bahwa informasi yang diberikan sudah cukup: "Kalau laporan keuangan secara detail memang tidak disosialisasikan kepada nasabah, tapi bagi saya informasi yang diberikan sudah cukup. Yang penting saya tahu kapan jadwal setor, berapa harga sampah, dan kapan bisa ambil tabungan. Grup WA cukup efektif, Mbak. Cepet nyampe infonya" (Wawancara, 19 Januari 2026).

Observasi pada proses penimbangan sampah menunjukkan bahwa pengelola melakukan penimbangan secara transparan di hadapan nasabah. Timbangan diletakkan di tempat yang dapat dilihat semua orang, dan hasil timbangan langsung diumumkan. Bapak Karjo yang memiliki

keterbatasan literasi digital tetap merasa cukup terinformasi: "Informasi saya dapat dari anak saya yang bantu lihat WA, dari tetangga, atau dari Bu RT yang teriak-teriak. Saya nggak terlalu pusing soal laporan keuangan yang detail, yang penting saya tahu kapan jadwal setor dan berapa saldo saya" (Wawancara, 18 Januari 2026). Ibu Tumirah juga mengandalkan informasi dari warung sebagai pusat informasi alternatif: "Saya sering ngobrol soal bank sampah sambil ngopi dengan nasabah lain. Jadi info tetap sampai, meskipun saya jarang buka WA. Kalau ada info penting, anak saya yang bilang. Tapi saya sering ngobrol soal bank sampah sambil ngopi dengan nasabah lain, jadi info tetap sampai" (Wawancara, 19 Januari 2026).

Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi di Bank Sampah Gati Bumi tidak hanya dipraktikkan dalam hubungan internal antara pengelola dan nasabah (melalui buku dan nota), tetapi juga dalam hubungan antara bank sampah dengan pemerintah daerah sebagai mitra pembina. Namun, transparansi laporan keuangan secara keseluruhan masih terbatas pada level pengurus inti dan belum disosialisasikan secara terbuka kepada seluruh nasabah.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini sama halnya dengan temuan Mukromi (2023) bahwa ketiga aspek modal sosial (jaringan, norma, dan kepercayaan) memiliki hubungan positif dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berkelanjutan. Penelitian ini menemukan bahwa di Bank Sampah Gati Bumi, jaringan sosial yang kuat dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dan PT. PLN Nusantara Power mempermudah akses informasi dan dukungan logistik, norma sosial melalui sistem reward mendorong nasabah untuk aktif menyetorkan sampah, serta kepercayaan yang tinggi antara pengelola dan nasabah menjadi perekat utama keberlangsungan program. Temuan ini memperkuat argumen Mukromi (2023) bahwa modal sosial bukan sekadar konsep abstrak, melainkan memiliki manifestasi nyata dalam bentuk partisipasi masyarakat.

Sama halnya dengan temuan Alfiansyah (2021) yang menunjukkan bahwa modal sosial Putnam menjadi instrumen penting bagi BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa modal sosial juga menjadi instrumen penting bagi Bank Sampah Gati Bumi dalam memberdayakan masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri. Norma tercermin melalui sistem reward bagi nasabah aktif, jaringan sosial melalui kemitraan dengan berbagai pihak, dan kepercayaan melalui sistem pencatatan ganda (buku dan nota). Namun, berbeda dengan Alfiansyah (2021) yang objek penelitiannya adalah BUMDes yang memiliki struktur kelembagaan formal dan dukungan pemerintah desa, Bank Sampah Gati Bumi justru beroperasi secara mandiri tanpa dukungan signifikan dari pemerintah desa. Perbedaan ini menunjukkan bahwa modal sosial dapat tetap terbangun bahkan dalam kondisi tanpa dukungan kelembagaan formal dari pemerintah desa, asalkan ada figur penggerak yang kuat dan jaringan dengan pihak eksternal yang memadai.

Berbeda dengan temuan Subagyo & Legowo (2021) yang menggunakan teori Fukuyama dan menemukan bahwa nilai keikhlasan dan norma tolong-menolong menjadi identitas kolektif masyarakat Desa Purwosari. Penelitian ini menemukan bahwa nilai yang lebih dominan dalam pengelolaan Bank Sampah Gati Bumi adalah nilai transaksional (insentif ekonomi) nilai keikhlasan. Nasabah lebih termotivasi oleh imbalan ekonomi langsung (uang tabungan yang dapat digunakan untuk membayar

semesteran anak atau membeli baju lebaran) daripada oleh nilai-nilai altruistik atau kewajiban moral. Perbedaan ini disebabkan oleh karakteristik objek penelitian yang berbeda: penelitian Subagyo & Legowo (2021) berfokus pada pemberdayaan masyarakat secara umum yang berbasis nilai gotong royong tradisional, sementara penelitian ini berfokus pada pengelolaan sampah berbasis bank sampah yang lebih menekankan pada manfaat ekonomi langsung bagi nasabah. Temuan ini menolak asumsi bahwa modal sosial di masyarakat Jawa selalu didasari oleh nilai keikhlasan dan gotong royong; dalam konteks ekonomi modern, insentif ekonomi justru menjadi pendorong utama partisipasi.

Temuan ini memperkuat penelitian Prawisudawati & Kustanti (2024) yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat lebih ditekankan pada modal sosial, mulai dari kepercayaan, norma, dan jaringan sosial. Penelitian ini juga menemukan bahwa masyarakat yang memiliki kepercayaan tinggi terhadap pengelola cenderung lebih aktif menyetorkan sampah, dan jaringan sosial yang kuat memudahkan penyebaran informasi tentang jadwal dan harga sampah. Namun, penelitian ini berbeda dengan Prawisudawati & Kustanti (2024) karena menemukan bahwa modal sosial di Bank Sampah Gati Bumi masih menghadapi berbagai hambatan signifikan, terutama lemahnya jaringan dengan pemerintah desa, tidak adanya aturan tertulis, dan partisipasi yang bersifat transaksional. Sementara itu, Prawisudawati & Kustanti (2024) lebih menekankan pada minimnya pemahaman masyarakat sebagai faktor utama rendahnya partisipasi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hambatan pengembangan modal sosial tidak hanya bersifat kognitif (pemahaman), tetapi juga bersifat struktural (jaringan kelembagaan) dan kultural (norma dan nilai).

Berbeda dengan temuan Pitaloka, Idrus & Saifuddin (2024) yang menemukan empat unsur pokok modal sosial (kerjasama, kepercayaan, jaringan, dan nilai/norma). Penelitian ini menggunakan tiga unsur modal sosial dari Putnam (jaringan, norma, dan kepercayaan) dan tidak memasukkan kerjasama sebagai unsur terpisah karena kerjasama dianggap sebagai output atau konsekuensi dari ketiga unsur tersebut, bukan sebagai unsur tersendiri. Meskipun demikian, temuan ini memperkuat penelitian Pitaloka dkk (2024) dalam hal manfaat modal sosial bagi masyarakat, yaitu membantu masyarakat dalam meningkatkan nilai sosial dan nilai ekonomi dari sampah. Penelitian ini juga menemukan bukti empiris yang lebih konkret: nasabah Bank Sampah Gati Bumi berhasil membayar semesteran anak dan membeli alat-alat tukang dari tabungan sampah, yang sejalan dengan temuan Pitaloka dkk (2024) bahwa modal sosial memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat.

Temuan ini menolak asumsi dari beberapa penelitian sebelumnya yang menganggap bahwa modal sosial di pedesaan Jawa selalu kuat, harmonis, dan berkelanjutan. Penelitian ini justru menemukan bahwa di Desa Gogodeso, modal sosial khususnya dalam dimensi jaringan dengan pemerintah desa justru lemah dan terputus sama sekali. Kepala Desa Gogodeso bahkan menyatakan tidak paham seluk-beluk Gati Bumi dan tidak pernah menerima laporan apapun sejak perubahan nama dari Cakrayuda menjadi Gati Bumi. Hal ini disebabkan oleh faktor spesifik lokus penelitian, yaitu adanya gesekan kepentingan terkait pengelolaan dana CSR antara pemerintah desa dan pengelola bank sampah. Temuan ini menunjukkan bahwa modal sosial bersifat dinamis dan kontekstual; ia bisa kuat di satu dimensi (jaringan dengan pihak eksternal) tetapi lemah di dimensi lain (jaringan dengan pemerintah desa), tergantung pada sejarah hubungan dan faktor-faktor situasional yang mempengaruhinya.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa modal sosial berperan penting dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Namun, penelitian ini juga memberikan kebaruan dengan tiga kontribusi utama: (1) mengklasifikasikan hambatan pengembangan modal sosial menjadi dua kategori (struktural/operasional dan relasional/kultural) yang belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya; (2) menganalisis secara simultan tiga level aktor (masyarakat/pengelola, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten) yang masih jarang dilakukan; serta (3) menemukan bahwa dalam konteks bank sampah di pedesaan, nilai transaksional (insentif ekonomi) lebih dominan daripada nilai keikhlasan, yang menolak asumsi romantisis tentang modal sosial di masyarakat Jawa.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat pengembangan modal sosial dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Gati Bumi ini yakni keterbatasan sarana dan prasarana operasional, kesenjangan komunikasi dengan pemerintah desa, tidak adanya aturan tertulis dan mekanisme sanksi sosial, partisipasi masyarakat yang bersifat transaksional, ketergantungan pada satu figur penggerak, serta keterbatasan akses digital bagi nasabah lansia.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulakn bahwa pertama, modal sosial dalam pengelolaan sampah di Bank Sampah Gati Bumi telah terbangun melalui tiga unsur utama menurut teori Robert D. Putnam yaitu pada dimensi jaringan sosial, norma timbal balik, dan kepercayaan, Kedua, faktor penghambat dalam pengembangan modal sosial di Bank Sampah Gati Bumi terdiri atas dua kategori, yaitu hambatan struktural/operasional meliputi keterbatasan sarana dan prasarana serta keterbatasan akses digital bagi nasabah lansia. Hambatan relasional/kultural meliputi kesenjangan komunikasi dengan pemerintah desa yang disebabkan oleh perbedaan pandangan mengenai pengelolaan dana CSR, tidak adanya aturan tertulis dan mekanisme sanksi sosial, partisipasi masyarakat yang cenderung transaksional (hanya aktif ketika ada insentif ekonomi), serta ketergantungan pada satu figur penggerak (Ibu Mardiyani) yang mengancam keberlanjutan program. Ketiga, upaya Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mengatasi hambatan pengembangan modal sosial meliputi bantuan sarana prasarana (TOSA, gerobak, timbangan), pelatihan dan pendampingan teknis bagi pengelola bank sampah, pembentukan forum komunikasi bank sampah tingkat kabupaten sebagai wadah sharing dan building trust, fasilitasi *study banding* ke Banyuwangi, kampanye masif di media dan sekolah (pendekatan *soft*), serta penguatan regulasi melalui Perdes (pendekatan *hard*). Selain itu, pemerintah juga merencanakan intervensi terpadu melalui program Desa Berseri yang meliputi penyediaan *dropbox*, pelatihan intensif, dan pendampingan pembentukan koperasi bank sampah di Desa Gogodeso.

Secara keseluruhan, modal sosial di Bank Sampah Gati Bumi telah terbangun cukup baik pada dimensi jaringan horizontal (dengan mitra eksternal) dan kepercayaan interpersonal, namun masih lemah pada dimensi jaringan vertikal (dengan pemerintah desa), norma tertulis, dan transparansi publik. Diperlukan sinergi antara pengelola bank sampah, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa

untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut guna mencapai keberlanjutan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui dan menjadi catatan bagi pembaca serta peneliti selanjutnya yaitu keterbatasan lokus, keterbatasan waktu penelitian, keterbatasan jumlah informan, keterbatasan akses informasi, dan keterbatasan metodologis.

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penelitian masa depan yang dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya yaitu penelitian kuantitatif**,** studi komparatif antar bank sampah, penelitian tentang model pemberdayaan ekonomi berbasis nilai tambah sampah, dan penelitian tentang digitalisasi bank sampah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar beserta jajarannya, Kepala Desa Gogodeso, dan Pengelola Bank Sampah Gati Bumi yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu menyukseskan selama pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

Alipour, A., Mousavi, S. S., & Ebrahimi, M. S. (2025). Social capital as a key predictor in solid rural waste management: A case study of rural residents in Iran. *Cleaner Waste Systems*, *11*, 100293. https://doi.org/10.1016/j.clwas.2025.100293

Argentiero, A., Chiarini, B., & Marzano, E. (2023). Do social capital and the quality of institutions affect waste recycling? *Waste Management*, *155*, 240–251. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2022.11.005

Bourdieu, P. (1986). *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. Greenwood Press. https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/bourdieu-forms-capital.htm

Claridge, T. (2014, October 7). Is social capital important? • Institute for Social Capital. *Institute for Social Capital*. https://www.socialcapitalresearch.com/is-social-capital-important/

Coleman, J. S. (1990). *Foundations of Social Theory*. Belknap press of Harvard university press.

Creswell, J. W. (2019). *Reserach Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Keempat). Pustaka Pelajar.

Filimonova, N., & Birchall, S. J. (2024). Sustainable municipal solid waste management: A comparative analysis of enablers and barriers to advance governance in the Arctic. *Journal of Environmental Management*, *371*, 123111. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.123111

Hamid, H. (2018). *Manajeme Pemberdayaan Masyarakat*. De La Macca.

Hanifan. (1916). The Rural School Community Center. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, *67*.

Kaza, S., Yao, L. C., Bhada-Tata, P., & Van Woerden, F. (2018). *What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050*. Washington, DC: World Bank. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1329-0

METRO TV (Director). (2025, March 18). *Indonesia Darurat Sampah, Presiden Prabowo Bahas Solusi di Istana Negara—[Prioritas Indonesia]* [Video recording]. https://www.youtube.com/watch?v=ksc_XXi517E

Monegro, R. H., Gonzales, K. E., Graham, S. R., Guerrero, M., Robertson, M. L., & Henderson, J. A. (2024). Learning from Tomorrow's Recyclers: Extension of Hands-on Recycled Waste Activity. *Journal of Chemical Education*, *101*(7), 2899–2902. https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.4c00387

Monica, P. (2025). *10 Negara Penghasil Sampah Terbanyak di Dunia, Indonesia Masuk 5 Besar!* https://garuda.tv/10-negara-penghasil-sampah-terbanyak-di-dunia-indonesia-masuk-5-besar/#5-indonesia

Nain, U., Kadir, Moch. D. F., & Sosiawan, A. (2023). Modal Sosial melalui Kepercayaan (Trust) Masyarakat di Dusun 1 Daungparue Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *Pallangga Praja*, *5*. https://doi.org/https://doi.org/10.61076/jpp.v5i1.3430

Putnam, R. D. (2001). *The contribution of human and social capital to sustained economic growth and well-being: International symposium report*. Human Resources Development Canada.

Satori, M., Amaranti, R., & Srirejeki, Y. (2020). Sustainability of waste bank and contribution of waste management. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, *830*(3), 032077. https://doi.org/10.1088/1757-899X/830/3/032077

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.

SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan. (n.d.). *Timbulan Sampah Kabupaten Blitar 2019-2024*. Retrieved September 2, 2025, from https://sampahnasional.kemenlh.go.id/portal-indikatif/data/timbulan-sampah

Suaib. (2023). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. CV. Adanu Abimata.

Sudarmono. (2021). *Pembangunan Modal Sosial* (1st ed.). Rtujuh Media Printing.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Wulandari, T., Sari, D. P., & Nasution, A. R. (2024). Deskripsi Mendalam untuk Memastikan Keteralihan Temuan Penelitian Kualitatif. *Jurnal Literasiologi*, *11*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.47783/literasiologi.v9i4